

BAB 2

HUBUNGAN AUSTRIA DENGAN ISRAEL SERTA BDS

Austria merupakan salah satu negara di Eropa yang erat kaitannya dengan Nazisme, Holocaust, dan Perang Dunia II. Dalam hal ini, Austria juga terlibat dalam hubungan yang baik dan buruk dengan orang-orang Yahudi, terutama yang berada di negara mereka. Bukan hanya sejarah dengan orang-orang Yahudi di negara nya saja, Austria juga memiliki sejarah dan hubungan dengan orang-orang Yahudi di luar Austria, seperti di Israel, yang mana turut memengaruhi hubungan kedua negara. Untuk dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai gambaran-gambaran tersebut, akan dijelaskan lebih lanjut melalui beberapa sub yang ada di dalam bab ini, yaitu 1) Sejarah Yahudi di Austria sejak Abad Pertengahan; 2) Sejarah Yahudi di Austria pada masa Perang Dunia I dan II; 3) Sejarah Hubungan Austria dengan Israel; 4) Aksi BDS terhadap Israel; 5) Kebijakan Austria dalam melawan aksi BDS terhadap Israel; dan 6) Kesimpulan.

2.1 Sejarah Yahudi di Austria sejak Abad Pertengahan

Austria memiliki sejarah yang erat terkait dengan orang-orang Yahudi, khususnya di ibu kota mereka, Wina. Sejarah kehidupan umat Yahudi di Austria dimulai sejak sekitar tahun 1194 dimana seorang Master Mint bernama Shlom bermukim di Wina dan tercatat sebagai permulaan sejarah orang-orang Yahudi (Jewish News from Austria, tanpa tahun). Masa ini masuk ke dalam periode Abad Pertengahan di mana komunitas Yahudi di Wina mulai berkembang menjadi relatif lebih besar. Sebelum banyaknya umat Yahudi yang bermukim di Wina, kebanyakan penduduk menganut agama Kristen dan kehidupan umat Kristen di sana tergolong kuat dengan gereja yang banyak dan berpengaruh (Jewish News from Austria, tanpa tahun). Selain itu,

pada tahun 1624 – 1625, pemukiman orang Yahudi dibatasi di sebuah ghetto di "Unterer Werd" yang terdiri dari 15 rumah tinggal. Dalam dekade berikutnya, komunitas Yahudi berkembang menjadi 132 rumah (Jewish Virtual Library, tanpa tahun).

Memasuki berabad-abad kemudian, tepatnya tahun 1780-an, angin segar berangsur-angsur mulai terasa bagi orang-orang Yahudi di Austria. Pada tahun 1781, Keputusan pengadilan oleh Joseph II memutuskan pelarangan pengenaan pajak pemungutan suara Leibmaut yang telah dibayarkan oleh orang Yahudi untuk memasuki kota-kota tertentu sejak Abad Pertengahan. Hal ini sangat membantu orang-orang Yahudi untuk hidup dan bergerak bebas dalam memasuki kota-kota di Austria layaknya masyarakat lainnya. Satu tahun setelahnya, Joseph II mengesahkan Toleranzpatent atau Toleration Edict atau Dekrit Toleransi, yang mencabut banyak undang-undang yang diskriminatif, namun orang-orang Yahudi belum mendapatkan hak sepenuhnya sebagai komunitas (Lorenz, 1994: 3).

Pada tahun 1848, orang-orang Yahudi mulai terwakili di antara para aktivis Revolusi Borjuis. Pada tahun 1852, Israelitische Cultus-Gemeinde (Komunitas Yahudi) dibentuk dengan status sementara yang kemudian turut meningkatkan Imigrasi Yahudi ke Wina dari daerah-daerah lain (Jewish News from Austria, tanpa tahun). Memasuki tahun 1867, disahkan hukum konstitusi kesetaraan penuh seluruh warga Austria, termasuk orang-orang Yahudi (Rozenblit, 1983). Dari sinilah kemudian berbagai tindakan yang menjunjung hak orang-orang Yahudi di Austria mulai ditingkatkan. Walaupun demikian, di sisi lain, tingkat anti-semitisme juga mulai meningkat. Karena kebebasan dan jumlah orang-orang Yahudi yang meningkat, stigma yang kurang baik atau kecemburuan sosial terhadap orang-

orang Yahudi juga meningkat. Walaupun demikian, komunitas Yahudi di Austria tetap dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Pada tahun 1890, terdapat sebuah *Israelitengesetz* (Hukum Yahudi) untuk mengatur hubungan hukum eksternal komunitas agama Yahudi (Rozenblit, 1983).

Berangkat dari berbagai pengalaman pahit di masa lalu yang dialami orang-orang Yahudi di Austria, pada tahun 1896, seseorang bernama Theodore Herzl, mendirikan Zionisme Politik. Zionisme Politik merupakan sebuah gerakan untuk mendirikan tanah air Yahudi. Herzl menerbitkan pamflet dan brosur mengenai “The Jewish State” atau “Negara Yahudi” yang mengusulkan bahwa masalah Yahudi adalah masalah politik yang harus diselesaikan oleh dewan bangsa-bangsa dunia (Britannica Encyclopedia, tanpa tahun).

2.2 Sejarah Yahudi di Austria pada Masa Perang Dunia I dan II

Walaupun telah ada pendirian Zionisme Politik oleh Herzl, tingkat anti-semitisme di Austria justru semakin meningkat hingga memasuki masa Perang Dunia I. Pada tahun 1914, Perang Dunia I pecah. Austria termasuk ke dalam pihak yang terlibat dalam perang tersebut setelah terbunuhnya Putra Mahkota Kekaisaran Austria-Hongaria, Franz Ferdinand, oleh Gravilo Princip. Karena pecahnya Perang Dunia I, pengungsi Yahudi dari wilayah perang Timur tiba di Wina dalam jumlah besar. Sejak akhir 1880-an, Wina sebenarnya sudah menjadi sarang anti-semitisme ekonomi dan politik, yang telah ditekankan selama Perang Dunia Pertama dan pada 1920-an oleh masuknya pengungsi Yahudi Galicia secara besar-besaran. Pada pertengahan tahun 1938 terjadi pengambilalihan kekuasaan internal oleh Nazi Austria, yang anti-semitismenya bahkan lebih radikal dan intens daripada di Reich Lama (Wistrich, 1992: 15).

Pada 12 Maret 1938, Pasukan Jerman masuk ke Austria dan menyerang apartemen dan lokasi bisnis orang-orang Yahudi di Austria. Padahal, pada masa itu, terdapat hampir 200.000 orang Yahudi di Wina (Wistrich, 1992: 16). Tindakan kekerasan anti-Yahudi semakin meluas di Austria. Hak-hak orang Yahudi dari layanan publik dihapus dan kemudian orang-orang Yahudi mulai di deportasi ke kamp konsentrasi Dachau. Pada musim panas hingga memasuki musim gugur pada tahun 1938 di Austria, berbagai dekrit yang bersifat diskriminatif diberlakukan, seperti larangan orang Yahudi untuk berada taman umum. Selain itu, banyak terjadi penutupan atau "Aryanization" dari banyak toko Yahudi. Puncaknya, pada tanggal 9 dan 10 November 1938, terjadi penghancuran dan pembakaran semua sinagoga dan kuil Wina. 6.547 orang Yahudi ditangkap (Jewish News from Austria, tanpa tahun).

Pada Mei 1939, sekitar 130.000 orang yang dianggap Yahudi di bawah Hukum Rasial Nuremberg telah meninggalkan Austria, tanah air mereka (Report from City of Vienna Official Website, tanpa tahun). Selain itu, hampir 50.000 pengungsi Yahudi dipindahkan selama masa ini ke tempat-tempat aman yang netral dan diselamatkan oleh Diplomat Spanyol (Carcedo, 2005 dalam Alperovitch & Schumacher, 2013). Walaupun sekitar 150.000 orang Yahudi telah meninggalkan Wina, ternyata masih banyak orang-orang Yahudi yang bertahan. Namun sayangnya, mereka yang bertahan justru harus merasakan nasib yang lebih buruk. Lebih dari 65.000 orang Yahudi dibunuh di kamp konsentrasi dan pemusnahan yang mana peristiwa ini dikenal dengan nama *Holocaust* (Report from City of Vienna Official Website, tanpa tahun). Mereka adalah bagian dari enam juta korban pembunuhan massal yang diatur dengan presisi matematis.

Gambar 2.1
Deportasi Massal Orang-Orang Yahudi di Wina tahun 1941



Sumber: Situs Resmi Kota Wina, tanpa tahun.

Nazisme menyebabkan perpecahan dramatis lainnya dalam perkembangan sejarah kota secara umum dan komunitas Yahudi pada khususnya. Tak dapat dipungkiri bahwa kejadian masa lalu sebelum perang telah hilang dan tidak dapat diperbaiki. Ungkapan rasa berdukacita yang sangat dalam atas matinya budaya Yahudi yang beraneka ragam di Austria yang kemudian membuat Wina tampak sebagai kota kematian dan kehancuran, dan sarat dengan kenangan akan pembunuhan orang Yahudi (Aichiger, 1954 dalam Lorenz, 1994: 1-2).

Setelah tahun 1945 atau pasca berakhirnya Perang Dunia II, komunitas kecil Yahudi di Wina yang aktif kembali berdiri dan bahkan memiliki anggota sekitar 7.000 orang Yahudi (Lorenz, 1994:1). Hingga selama dua dekade terakhir ini, telah terjadi peningkatan dalam upaya untuk menghadapi sejarah Yahudi di Wina dan untuk memeriksa kembali warisan Yahudi Wina. Selain itu sejumlah museum dan tugu peringatan dibangun untuk membangkitkan warisan Yahudi, seperti Museum

Yahudi Kota Wina, Museum Judenplatz, dan Monumen Peringatan Menentang Perang dan Fasisme di Albertinaplatz dan Memorial Shoah di Judenplatz.

Setelah Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan Jerman, NAZI tidak lagi berkuasa, ditambah dengan Adolf Hitler yang telah tewas, orang-orang Yahudi dapat kembali ke Wina. Pada April 1945, Komunitas Yahudi di Wina mulai dibentuk kembali. Setelah berakhirnya perang, sebagian besar tempat Wina menjadi kamp bagi para pengungsi dari Timur. Kebanyakan adalah orang-orang Yahudi yang ingin beremigrasi ke tanah Palestina. Sejak tahun 1970, Wina menjadi "jembatan" bagi orang Yahudi Soviet, yang tidak dapat beremigrasi langsung ke Israel dari Uni Soviet (Govrin, 2016: 487). Hingga pada akhirnya, banyak dari mereka yang memutuskan untuk tinggal dan menetap di Wina.

2.3 Sejarah Hubungan Austria dan Israel

Hubungan Israel dengan Austria telah mengalami banyak perubahan dan pasang surut selama enam puluh tahun hubungan kedua negara sejak mereka meresmikan hubungan formal (Alpervotich & Schumacher, 2013). Sejarah hubungan kedua negara ini akan dibahas lebih lanjut dalam beberapa sub-bab berikut ini.

2.3.1 Hubungan Austria terhadap Israel Periode 1950-an (sejak berdirinya Israel)

Austria mulai mengakui Israel sebagai negara sejak pada 5 Maret 1949. Ini merupakan cikal bakal terbentuknya hubungan lebih lanjut kedua negara. Sejak mengakui Israel sebagai negara, kedua negara kemudian mulai menjalin hubungan secara tidak resmi yang sudah ada sejak 1950-an. Kemudian, kedua negara baru secara resmi memiliki hubungan diplomatik timbal-balik tingkat *legations* pada tahun 1956 dan meningkat menjadi kedutaan atau *embassies* pada tahun 1959 (Govrin, 2016: 480).

Sebelum resmi membuka hubungan diplomatik hingga ke tingkat kedutaan, hubungan kedua negara cenderung mengalami pasang surut karena masa lalu Austria yang masih dibayangi oleh peristiwa Perang Dunia II dan *Holocaust* yang telah memusnahkan ratusan ribu orang Yahudi di Austria. Selain itu, dikatakan bahwa Israel memandang Austria sebagai bagian integral dari Reich Ketiga, di mana ada unsur Nazi lokal yang kuat (Avner to Levin, 1949 dalam Ministry of Foreign Affairs, 2010). Dimulainya hubungan Israel dengan Austria tidak seperti hubungan Israel dengan negara lainnya, yang berkaitan dengan konflik Arab-Israel. Hubungan Israel dan Austria lebih diwarnai oleh peristiwa-peristiwa di masa lampau yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi di Austria.

Sejak berdirinya negara, Israel telah menargetkan untuk berhubungan dengan banyak negara, terutama negara-negara di Eropa. Akan tetapi, Israel merasa cukup ragu untuk berhubungan secara resmi dengan Jerman dan Austria karena masa lalu yang traumatis untuk orang-orang Yahudi. Israel, sebagai negara Yahudi, pada awalnya pun menolak berulang kali untuk dapat melakukan hubungan yang lebih formal terhadap Austria. Pengalaman masa lalu mereka yang buruk terhadap orang-orang Yahudi sehingga Austria harus melewati banyak sekali rintangan agar bisa berhubungan resmi dengan Israel. Hubungan diplomatik antara kedua negara pun ditempuh hingga enam tahun lamanya setelah Israel berdiri. Ketika akan membuka hubungan diplomatik dengan Austria, Kementrian Luar Negeri Israel mengeluarkan beberapa syarat, salah satunya adalah Austria harus menyelesaikan perjanjian dengan komunitas Yahudi Wina dan menandatangani Konferensi Klaim Material Yahudi Terhadap Austria untuk kompensasi dasar bagi para korban penganiayaan Nazi di negara itu (Zweig, 2010: 47-49). Setelah

kesepakatan terjadi kesepakatan dan syarat terpenuhi, barulah pada pada tahun 1956, Israel setuju untuk mengubah perwakilan konsuler ke hubungan diplomatik secara resmi.

Setelah resmi memiliki hubungan diplomatik, hubungan Austria dengan Israel tidak berfokus pada konflik Arab-Israel yang sebenarnya menjadi prioritas utama hubungan luar negeri Israel. Hubungan kedua negara lebih berfokus pada penyelesaian klaim material orang-orang Yahudi pasca *holocaust*. Pertanyaan tentang restitusi dan ganti rugi telah menghantui hubungan Austria dan orang-orang Yahudi serta hubungan antara Israel dan Republik Austria (Alpervotich & Schumacher, 2013: 149). Selain itu, tidak ada hubungan antara kedua negara ini yang mempengaruhi konflik Arab-Israel. Secara singkat, seharusnya tidak ada masalah yang penting dalam hubungan kedua negara. Namun demikian, hubungan Austria dan Israel malah bertolak belakang dengan yang seharusnya. Hubungan kedua negara dapat dikatakan rumit dan sangat bermasalah karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hubungan mereka berkaitan dengan ganti-rugi dan tanggung jawab material pasca *Holocaust* yang sangat sulit ditempuh. Karena sangat sulit ditempuh, bahkan perkara ini masih belum dapat terselesaikan hingga 50 tahun pasca diresmikannya hubungan diplomatik kedua negara (Zweig, 2010: 57-59).

Dalam praktiknya, Israel masih cenderung menjaga jarak hingga Austria bersedia memperbaiki konsekuensi material dari kesalahan sejarah. Namun, karena Austria berfungsi sebagai stasiun transit bagi orang Yahudi yang ingin melarikan diri dari negara-negara Blok Timur, terutama Hongaria, hingga pada akhirnya Israel juga harus melunak untuk berhubungan dengan Austria (Govrin, 2016: 487). Israel berkepentingan untuk memelihara kontak dengan negara tempat para pengungsi itu transit dengan izin dari pihak berwenang.

2.3.2 Era Baru Hubungan Austria-Israel (periode 1990-an)

Setelah cukup lama berhubungan dengan hanya berfokus pada penyelesaian klaim material orang-orang Yahudi pasca *Holocaust*, pada akhirnya, era baru hubungan kedua negara dimulai. Era baru tersebut dimulai pada kurun waktu 1990-an, tepatnya pada tahun 1992 dengan terpilihnya Thomas Klestil sebagai Presiden Austria. Terpilihnya Klestin memberikan kesempatan tidak hanya untuk memulihkan hubungan timbal balik Austria-Israel, tetapi juga untuk memperluas dan memperdalam hubungan kedua negara di banyak bidang praktis. Israel dan Austria kemudian segera terlibat dalam dialog politik intensif di semua tingkatan, menandatangani perjanjian bilateral untuk pertama kalinya di bidang ekonomi, budaya, sains, pendidikan, dan keamanan, serta bertukar kunjungan resmi di tingkat kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri, Perdagangan dan Industri, Ekonomi, Kebudayaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Pertahanan (Govrin, 2016: 486).

Era baru ini memberikan kesempatan Austria-Israel untuk memperdalam hubungan mereka di bidang lain. Akan tetapi, tanggung jawab akan *Holocaust* tetap menjadi fokus yang tak dapat dikesampingkan. Pada kurun waktu 1993-1994, secara resmi, Kanselir Vranitzky (1993) dan Presiden Klestil (1994) melakukan kunjungan ke Israel. Kunjungan ini menjadi kunjungan tingkat tinggi pertama yang dilakukan dalam sejarah hubungan Austria-Israel. Dalam pidato resmi mereka masing-masing — Vranitzky di Universitas Ibrani Yerusalem (di mana ia menerima gelar doktor kehormatan) dan Klestil di Knesset — kedua negarawan merujuk pada *Holocaust* orang Yahudi di Austria dan tanggung jawab Austria atas kejahatan yang dilakukan oleh rezim Nazi melawan warga negara Yahudi Austria. Setiap orang juga merujuk pada tindakan

kriminal yang telah dilakukan oleh orang-orang Austria selama *Holocaust*, sebuah tanggung jawab yang telah lama belum diselesaikan oleh Austria (Govrin, 2016: 489).

Kondisi pada periode 1990-an ini menunjukkan keadaan positif yang sedang berlangsung di antara hubungan Israel dan Austria. Keadaan positif lainnya yang ditunjukkan salah satunya adalah upaya universitas Austria untuk mendirikan kursus studi Yahudi dan memperoleh buku-buku tentang Israel dan sejarah Yahudi. Lembaga-lembaga ini juga memberikan ceramah tentang Israel dan proses perdamaian di Timur Tengah. Kedutaan Besar Israel di Austria juga bekerja dengan tekun untuk mengembangkan hubungan dengan asosiasi Austria dari universitas Israel, institusi medis, Yad Vashem, Perkumpulan Persahabatan Austria-Israel, serta dengan media Austria (Govrin, 2016: 493-494).

2.3.3 Hubungan Austria-Israel Periode Kontemporer

Memasuki periode yang lebih kontemporer, terutama pada masa jabatan Kanselir Sebastian Kurz, hubungan Israel dan Austria yang sebelumnya sudah membaik, sempat memanas. Hal ini disebabkan karena pemerintah Austria yang lebih berpihak kepada Partai Sayap Kanan, salah satunya adalah Partai Kebebasan, yang memiliki catatan panjang dengan NAZI dan anti-Semitisme di dalam jajarannya. Hal ini kemudian menjadi permasalahan yang sensitif dalam hubungan Austria dengan Israel, yang sebagian besar menolak untuk berurusan dengan Partai Kebebasan (Jewish Telegraphic Agencies, 2020). Sejak Austria membentuk koalisi ini, Israel telah menahan diri dari kontak apa pun dengan menteri dari Partai Kebebasan atas masa lalu neo-Nazi dan rasisnya. Austria kemudian menghubungi Israel, dengan mengatakan pihaknya tertarik pada hubungan normal dengan semua komponen pemerintah. Sejak pemerintah Austria yang baru terpilih, Netanyahu telah bekerja secara bersamaan untuk mencegah para pejabat Israel

bertemu dengan para menteri Partai Kebebasan saat mengirim utusan ke Austria (Times of Israel, 2020).

Akhirnya, sejak tahun 2019, mulai terdapat upaya untuk memulihkan hubungan Austria dengan Israel. Salah satunya adalah dengan melalui diskusi dalam forum-forum terbuka. Pada 18 November 2019, Kedutaan Besar Austria menjadi tuan rumah American University's Center for Israel Studies, sebuah acara yang menyelidiki hubungan Austria-Israel. Diskusi ini bertajuk "*From the Birthplace of Zionism to Austria-Israeli Relations Today.*" Pada diskusi ini, Duta Besar Weiss memberikan gambaran singkat tentang hubungan Austria-Israel dari tahun 1946 hingga saat ini. Profesor Brenne, Ketua Abensohn di Studi Israel dan Direktur Pusat Studi Israel di Universitas Amerika, kemudian juga mengingatkan hadirin bahwa terdapat hubungan Austria dan Israel, bahkan sebelum negara Israel terbentuk karena Theodor Herzl sudah memikirkan negara Israel di Wina sejak tahun 1896 (Austrian Embassy Washington, 2019).

Gambar 2.2
Duta Besar Martin Weiss.



Sumber: Austrian Embassy Washington, 2020

Memasuki tahun 2020, sebagai bukti bahwa hubungan Austria dan Israel berangsur-angsur memulih, Austria kemudian dengan tanggap juga turut mendukung Israel dalam melawan aksi Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, terutama yang mendukung kemerdekaan Palestina dari jajahan Israel. Austria bahkan mengeluarkan kecaman, kutukan, dan resolusi yang berkaitan dengan melawan anti-Semitisme dan aksi BDS. Hal ini cukup membuktikan bahwa hubungan kedua negara semakin membaik. “Kemitraan Austria dengan Israel adalah contoh cemerlang untuk diikuti negara-negara Eropa lainnya, namun kita perlu melangkah lebih jauh dan menetapkan agenda positif dengan negara Yahudi, baik di Wina maupun di Brussel.” kata Lukas Mandl, selaku Anggota Parlemen Eropa Austria (Jerusalem Post, 2020). Bahkan, baru-baru ini Kanselir Austria, Sebastian Kurz, mengibarkan bendera Israel di atap gedung kanselir di Wina sebagai tanda solidaritas dengan Negara Israel (Europorter, 2021).

2.4 Aksi Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) terhadap Israel

Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) adalah gerakan global untuk menentang kejahatan perang Israel dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang Palestina dengan cara tanpa kekerasan. Aksi ini dimulai pada tahun 2005 dan bermula sebagai tuntutan dari masyarakat sipil Palestina kepada komunitas internasional untuk melakukan Boikot, Divestasi, dan Sanksi kepada Israel dan perwakilannya untuk menekan Israel agar menerapkan hukum internasional terhadap orang-orang Palestina (Al-Jazeera, 2020). Gerakan ini memiliki tiga tuntutan, yakni 1) Israel mengakhiri penjajahan dan pendudukannya atas seluruh tanah Palestina yang diduduki pada bulan Juni 1967, membongkar tembok apartheid dan mencabut pengepungan Gaza; 2) Mengakui hak-hak dasar warga Palestina di Israel atas kesetaraan penuh; dan 3)

Menghormati, melindungi dan mempromosikan hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka (BDS Movement, tanpa tahun).

Dengan berjalannya aksi ini, terdapat banyak pihak yang berangsur-angsur mendukung aksi ini. Mereka yang mendukung aksi BDS sebagian besar merupakan organisasi yang menjunjung hak asasi manusia dan menentang apa yang dilakukan Israel terhadap palestina. Dikutip dari Haaretz (2018) setidaknya, terdapat beberapa organisasi mancanegara yang dapat disebutkan, yakni France-Palestine Solidarity Association, The European Coordination of Committees and Associations for Palestine, Friends of Al-Aqsa, War on Want, Code Pink, dan organisasi BDS di Perancis, Chile, Italia, dan Afrika Selatan. Selain itu, bukan hanya organisasi-organisasi mancanegara saja yang pro dengan BDS. Beberapa negara, salah satunya Irlandia, bahkan mengajukan RUU yang akan mencegah penjualan barang dari pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang mereka duduki. Dengan disetujui RUU ini nantinya, diperkirakan akan memengaruhi kerugian ekspor Israel ke Irlandia yang jumlahnya mencapai \$580.000 dan \$1,1 juta per tahun dan berpotensi untuk diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya untuk mendukung aksi BDS (Middle East Monitor, 2019).

Walaupun banyak pihak di dunia yang pro dengan gerakan ini, ternyata terdapat pula beberapa pihak baik negara maupun non negara yang kontra dengan aksi tersebut. Mereka yang kontra menganggap bahwa aksi ini merupakan perpanjangan tangan dari anti-semitisme, yang pada akhirnya akan semakin menyebarkan kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Dilansir dari Heute dalam Jerusalem Post, dikatakan bahwa gerakan BDS menyerukan boikot dan sanksi terhadap Israel, yang legitimasinya disangkal sebagai sebuah negara. Negara Israel dan Yahudi dihina dalam demonstrasi dan gerakan tersebut, misalnya dengan menuduh Israel melakukan genosida yang menyangkal semua

fakta. Oleh karena itu, para ahli mengklasifikasikan gerakan ini sebagai anti-semitisme (Jerusalem Post, 2019).

2.5 Kebijakan Austria dalam melawan aksi BDS terhadap Israel

Austria merupakan salah satu negara yang menolak dan mengecam aksi BDS terhadap Israel. Austria bahkan secara terang-terangan juga memberikan dukungannya kepada Israel untuk melawan aksi tersebut. Aksi BDS tersebut tentunya memberikan dampak yang kurang baik terhadap Israel, baik dari segi ekonomi, maupun dari segi psikologis masyarakatnya yang mayoritas adalah Yahudi. Aksi ini dikhawatirkan akan mengarah kepada anti-Semitisme yang besar terhadap orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, sebagai respons atas aksi BDS oleh negara-negara di dunia terhadap Israel, pada Januari 2020, Dewan Nasional Austria dengan tegas mengutuk dan mengecam semua bentuk anti-Semitisme, termasuk anti-Semitisme yang berhubungan dengan Israel, dan menyerukan kepada pemerintah untuk secara tegas dan konsisten melawan kecenderungan ini.

Dikutip dari laman resmi Pemerintah Austria, berdasarkan kecaman tersebut, Pemerintah Federal juga diminta untuk Austria bahkan mengeluarkan resolusi yang berkaitan dengan melawan anti-Semitisme dan aksi BDS. Para pihak setuju bahwa gerakan BDS dan tujuannya akan dikutuk dengan tajam, dan acara mereka tidak akan disediakan tempat dan infrastruktur, serta tidak akan didanai secara finansial atau dalam bentuk lainnya. Pemerintah juga harus mengembangkan strategi holistik untuk mencegah dan memerangi semua bentuk anti-Semitisme untuk mencegah rasisme, xenofobia, radikalisasi, dan ekstremisme kekerasan, dengan keterlibatan dekat dari semua badan yang relevan; (Parliamentary Correspondence No. 125, Republic of Austria Parliament, 2020).

Berangkat dari kecaman tersebut, lima partai besar yang diwakili dalam Dewan Nasional Austria, kemudian setuju agar kecaman tersebut dijadikan dan dibuatkan teks resolusi dan diadakan pemungutan suara. Anggota parlemen Austria jarang memberikan suara menentang faksi mereka sendiri, yang berarti bahwa resolusi kemungkinan akan diterima dengan suara bulat (Times of Israel, 2019). Setelah resmi mengeluarkan kecaman terhadap aksi BDS yang dilakukan negara-negara di dunia terhadap Israel, pada 27 Februari 2020, Dewan Nasional Austria mengadopsi resolusi yang mengutuk segala bentuk anti-Semitisme, termasuk anti-Semitisme yang ditujukan pada Israel, dan menyerukan kepada pemerintah Austria untuk melawan kecenderungan tersebut dengan tekad. Ini termasuk apa yang disebut gerakan BDS yang diarahkan ke Israel. Berdasarkan resolusi yang dikeluarkan secara resmi dalam laman resmi Pemerintah Austria, terdapat beberapa poin yang tercantum dalam resolusi tersebut, di mana secara khusus, pemerintah diminta untuk:

- 1) untuk mengembangkan, dengan keterlibatan erat semua pemangku kepentingan yang relevan, strategi komprehensif untuk mencegah dan memerangi semua bentuk anti-Semitisme sebagai bagian dari upaya untuk mencegah rasisme, xenofobia, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan;
- 2) untuk mengutuk keras gerakan BDS dan tujuannya, khususnya seruan untuk memboikot produk, perusahaan, artis, ilmuwan atau atlet Israel;
- 3) tidak menyediakan tempat dan infrastruktur untuk organisasi dan masyarakat yang mengekspresikan pandangan anti-Semit atau mempertanyakan hak eksistensi Israel;
- 4) tidak mendukung peristiwa pergerakan BDS atau kelompok yang mengejar tujuannya, baik secara finansial atau dalam bentuk lainnya;

- 5) untuk terus mengembangkan peran Austria sebagai tempat penting dialog dan pertukaran internasional.

Resolusi tersebut mendapat dukungan bulat dari semua perwakilan dan memberikan suara yang kuat untuk toleransi dan perang melawan anti-Semitisme di Austria dan sekitarnya (Austrian Embassy Washington, 2020).

Austria secara resmi telah mengutuk dan mengeluarkan resolusi untuk melawan tindakan anti-Semitisme dan BDS terhadap orang-orang Yahudi dan Israel. Bagi Austria, tindakan-tindakan seperti anti-semitisme dan BDS merupakan tindakan yang bersifat diskriminatif, terutama terhadap orang-orang dan negara Yahudi. Diskriminasi terhadap orang-orang Yahudi sebelumnya sudah pernah terjadi di Austria bahkan sejak abad pertengahan. Tindakan diskriminatif semacam ini bukanlah hal yang bisa ditoleransi oleh Austria karena akan menjadi sangat buruk apabila tindakan semacam itu berkembang kembali seperti yang terjadi di masa lampau.

Selain itu, Dewan Nasional Austria juga meminta negara-negara anggota Uni Eropa lainnya untuk memerhatikan resolusi tersebut dan tidak mendukung gerakan BDS karena gerakan tersebut turut menimbulkan anti-Semitisme yang lebih besar. Sebagai tanggapan dari seruan tersebut, *Transatlantic Friends of Israel* (TFI) di Parlemen Eropa, menyambut baik kecaman dan resolusi Austria tersebut. Berdasarkan pernyataan TFI, dikatakan bahwa mereka menyambut kecaman parlemen Austria atas gerakan BDS terhadap Israel yang mendesak pemerintah Austria dan negara anggota Uni Eropa lainnya untuk memperhatikan seruan resolusi tersebut. (Jerusalem Post, 2020).

2.6 Kesimpulan

Austria merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki sejarah panjang dengan orang-orang Yahudi, bahkan sejak Abad Pertengahan. Sejarah Austria dengan orang-orang Yahudi di kemudian hari mengantarkan mereka untuk berhubungan dengan Israel, satu-satunya negara Yahudi di dunia. Berdasarkan pemaparan yang telah ada, dapat disimpulkan bahwa sejarah Austria dengan Israel yang mengalami naik dan turun tak luput dari sejarah yang ada, apalagi sejarah Austria dengan orang-orang Yahudi dari masa ke masa juga tidak selalu baik. Bahkan, pada masa yang lebih kontemporer pun, hubungan kedua negara juga masih mengalami naik dan turun walaupun tidak se-ekstrem masa-masa sebelumnya.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa berbagai peristiwa yang telah terjadi di antara mereka di masa lalu berhubungan dengan tindakan yang dilakukan di masa mendatang, seperti Austria yang pada akhirnya memilih untuk mendukung Israel untuk melawan aksi BDS yang dianggap sebagai anti-Semitisme yang dapat meningkatkan kebencian terhadap orang-orang Yahudi seperti yang terjadi di masa lalu. Beberapa kebijakan yang kemudian dikeluarkan Austria adalah dengan mengeluarkan kutukan, kecaman, dan resolusi yang mengecam aksi BDS dan anti-Semitisme. Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai hubungan masa lalu dengan tindakan di masa kini yang dilakukan Austria akan dilanjutkan di dalam bab selanjutnya.